

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. Pertama 1999.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Danial dan Wasriah. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan UPI, 2019.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm.39-40.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Persepektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2005.
- Erwin, Rudy T. *Petunjuk Praktis untuk Penyelesaian Perkara-perkara Anda*, Jilid I, Jakarta: Selektia Group, 1978.
- Fuadi, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditrya Bakti, 2005.
- Ghazali, M. Munir, dan Gani, Abdul, dkk. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN*. Jakarta, Depag, 1983.
- Gunawan, Ilham, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Bandung: Angkasa, 1993.
- Gunawan, Ilham, *Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Stabilitas Politik*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan I, 1994.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, Ghalia Indonesia, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu. 1987.
- Hajar, Ibnu. *Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*. Yogyakarta: Al-Mawarid Edisi XII, 2004.
- Hamzah, Andi, *Jaksa diberbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Jakarta: Grafika, 1995.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Medan: CV. Zahir, cet. I, 1975.

- Hazairin. *Tinjauan mengenai Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tintamas Indonesia, cet. I, 1975.
- Husein, Harun M. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Jauhari, Iman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga Poligami*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.
- Kahlany (al), Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam*. Jilid 3. Bandung: Dahlan, t.t.
- Kejaksaan Agung RI. *Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)*, XXII, Jakarta : Kejaksaan, 2010.
- Kejaksaan Negeri Semarang. *Pengarahannya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada Raker Kejaksaan*, 5 Juni 2000.
- M.H. Tirtaadmijaya, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta : Fasco, 1995.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*. Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2012.
- Marbun, BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2016.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU Nomor 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta : Prenada Media, Cetakan Kedua, 2004.
- Prakoso, Djoko dan Murtika, I Ketut. *Kedudukan Jaksa dalam Hukum Perdata*. Jakarta : Bina Aksara, 1998.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata*, Jakarta : Sumur Bandung, 1979.
- R. Badri. *Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*, Surabaya: Amin Surabaya, 1985.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet.2. Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm.3-4.
- Rosjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. I, 1991.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 70.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico. 1985.

- Situmerang, Victor dan Soedibyo. *Pokok-pokok Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2012.
- Sosroatmojo, Arso. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1991.
- Sulistini, Elise T. *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, cet. I, 1978.
- Supramono, Gatot. *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Djambatan, 1998.
- Sutanto, Retnowulan. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cet. VIII. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Putra Grafika, Cet. Ke-3, Edisi Pertama, 2009.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Wantjik, K Shaleh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Yandianto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung, M2S, 2001.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Zuhaily (al) Wahbah. *Al-Fiqh Al- Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-fikr, 1989.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1961 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia*.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum ,Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara*.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang *Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*.

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang *Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI*.

C. Artikel/Jurnal Internet

Darsi. *Kedudukan Jaksa dalam Pembatalan Perkawinan (Studi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Vol.15, No.2, December 2017, pp.31-36. p-ISSN: 1858-1099 | e-ISSN: 1858-1xxx. <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>. Published online Dec 31, 2017. Akses 5 Jul 2021 01:20:45 GMT.

Febrianty, Yenny. *Implementasi Kewenangan Kejaksaan Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Kepailitan Demi Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan Sosial*. Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 Nomor 1 April Tahun 2019. Tersedia: <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/753>. Akses: tanggal 3 Ags 2021 06:24:33 GMT.

Kejati NTB. Gugatan dari Kejati NTB dan Kejari Mataram Atas Perkawinan Sejenis. <https://kejati-ntb.kejaksaan.go.id> 27 Ags 2021 01:13:35 GMT

Maharani, Putri. *Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) Ditinjau dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Kertha Patrika, Vol. 40, Nomor 2 Agustus 2018, hlm. 122-130. Tersedia: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/40636>. Akses 28 Jul 2021 11:33:48 GMT.

Mardiyah dan Yahya, Azhari. *Kewenangan Kejaksaan Dalam Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Besar)*. LEGITIMASI, Vol. VII Nomor 1, Januari-Juni 2018. Tersedia: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/3967>. Akses: 11 Jul 2021 19:33:52 GMT.

- Rusli, Tami. *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Pranata Hukum Volume 8 No 2 Juli 2013. Tersedia: <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/196>. Akses : 28 Jul 2021 02:55:47 GMT.
- Septiandini, Kadek Mitha *Ketentuan Tentang Pembatalan Perkawinan Oleh Jaksa Terhadap Hak Waris Anak Dalam Hukum Perkawinan*. Jurnal Publikasi Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2015. Tersedia: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43898>. Akses: 9 Jun 2021 05:16:29 GMT.
- Tusan, Putu Sauca Arimbawa. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 6 Nomor 2. 2017. Tersedia: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/35831>. Akses: 24 Jul 2021 04:03:28 GMT,
- Wulansari, Emma Desy. *Ta'aruf Sebagai Upaya Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam*. Jurist Diction. Volume 1 Nomor 2, November 2018. Tersedia: <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11004>. Akses: 20 Jul 2021 17:18:59 GMT.
- Yusuf, Muhammad. *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata dan Tata Usaha Negara*. Jurnal Publikasi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan. 2016. Tersedia: <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika/article/view/1500>. Akses 6 Jul 2021 21:17:30 GMT.

D. Skripsi/Tesis/Disertasi Internet

- Fahrudin, Nanang. *Kewenangan Jaksa Mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No 196 K/AG/1994)*. Skripsi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum. 2013. Tersedia: <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8775>. Akses 27 Jul 2021 00:53:14 GMT.
- Mahessa, Rien Gita. *Kewenangan dan Peran Jaksa Dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga / Akhwal Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Slam Negeri (Iain) Purwokerto. Tersedia: <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/979/>. Akses : 26 Jun 2021 16:57:17 GMT

E. Wawancara

Nugraha, Ginanjar. Wawancara: *Masalah Pelanggaran Perkawinan dan Permohonan Pembatalan Perkawinan*. Cirebon: Jaksa Fungsional pada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Selasa tanggal 13 Juli 2021.



